

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengalami reformasi di bidang keuangan negara dimulai dengan diterbitkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan pemerintah untuk menyampaikan laporan keuangan setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Penyusunan dan penyajian struktur maupun isi laporan sebagai pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang KSAP, pemerintah mulai membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP ini mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP adalah prinsip-prinsip dalam akuntansi untuk diimplementasikan saat penyusunan serta penyajian laporan keuangan. Adanya SAP diperlukan untuk menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi laporan yang berkualitas, serta mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan akuntansi pada entitas pemerintah.

SAP yang pertama ditetapkan dengan dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Pada sistem pencatatan akuntansi, SAP ini masih memakai pendekatan berbasis *Cash Toward Accrual (CTA)*. Penyusunan laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah menggunakan pedoman SAP yang dimulai pada tahun 2005. Pada 2010, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Pemerintah mewajibkan pengimplementasian SAP dengan basis akrual pada penyusunan LKPP maupun LKPD. Penerapan SAP dengan basis akrual ini dilakukan mulai dari pengimplementasian SAP berbasis CTA menjadi SAP dengan basis akrual secara bertahap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, SAP dengan basis akrual merupakan SAP sebagaimana pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas diakui pada pelaporan finansial berbasis akrual dan pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui pada pelaporan pelaksanaan anggaran sesuai basis yang ditentukan dalam APBN atau APBD. Seluruh pelaporan keuangan selambat-lambatnya harus menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun 2015.

SAP dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan disertai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi dan kerangka konseptual, maka ketentuan pada standar akuntansi lebih diunggulkan daripada kerangka konseptual. PSAP juga disertai dengan adanya Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan/atau Buletin Teknis SAP yang penyusunan dan penerbitannya dilakukan oleh KSAP serta disampaikan ke pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban atas keuangan negara atau daerah yang dikelola selama suatu periode. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pokok pemerintah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Basis akrual adalah basis dalam akuntansi dengan mengakui, mengukur, dan menyajikan suatu transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi dengan tidak memperhatikan terjadinya penerimaan kas atau pembayarannya pada laporan keuangan. Salah satu laporan yang menggunakan basis akrual adalah laporan operasional.

Laporan operasional merupakan laporan yang menunjukkan ikhtisar sumber daya ekonomi sebagai penambah ekuitas dan pengelolaan penggunaannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintah pada satu periode pelaporan. Laporan ini mencakup pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO. Laporan ini dibuat untuk melengkapi laporan dalam siklus akuntansi dengan basis akrual, maka dari itu antara Laporan Operasional, Neraca, dan LPE memiliki hubungan yang penyusunannya mampu dipertanggungjawabkan.

Penerapan akuntansi pada pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena laporan keuangan tersebut berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah dan media transparansi atas pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Laporan keuangan juga digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja. Peraturan dan panduan dalam penyusunan laporan keuangan telah dibuat sedemikian rupa agar tercipta laporan yang berkualitas. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, terdapat empat kriteria atau prasyarat normatif yang dibutuhkan supaya kualitas dari laporan keuangan dapat terpenuhi seperti yang diharapkan, yaitu laporan yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Namun, kenyataannya masih terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh entitas pelaporan, baik dalam hal pengakuan, pengukuran, maupun penyajian suatu laporan. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020, BPK menemukan adanya kelemahan yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tidak mengatur pencatatan atas hibah dalam bentuk barang pada laporan operasional yang mengakibatkan Beban Hibah berupa barang berpotensi tidak tercatat pada laporan operasional.

Pemerintah telah menerapkan akuntansi berbasis akrual pada semua satuan kerja di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Setiap entitas pelaporan

wajib mengimplementasikan akuntansi dengan basis akrual pada saat penyusunan laporan keuangannya, begitu pula entitas pelaporan yang berada di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan tersebut adalah laporan operasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui penyusunan dan penyajian laporan operasional pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan meninjau kesesuaian penerapan penyusunan dan penyajian laporan tersebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil dari tinjauan tersebut akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Bagaimana penyusunan dan penyajian laporan operasional pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2020?
2. Bagaimana kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan operasional pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2020 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Untuk mendapatkan pemahaman penyusunan dan penyajian laporan operasional pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2020.
2. Untuk mendapatkan pemahaman kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan operasional pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2020 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menjadikan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek utama dalam penulisan KTTA. Selain itu, laporan keuangan yang digunakan adalah laporan operasional tahun anggaran 2020. Laporan operasional tersebut dibandingkan dengan peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang terdapat pada PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional yang tertuang pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 termasuk dengan IPSAP dan Buletin Teknis yang terkait.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya karya tulis ini, penulis diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang penerapan SAP berbasis akrual terutama pada penyusunan laporan operasional. Selain itu, karya tulis ini sebagai sarana aktualisasi diri untuk mengimplementasikan teori yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan secara langsung pada objek yang dituju.

b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan dapat menambah sumber informasi tentang penerapan SAP berbasis akrual pada entitas pelaporan terkait pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah terutama pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerapan SAP berbasis akrual pada periode pelaporan berikutnya.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan yang relevan terhadap mata kuliah terkait. Selain itu, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penulisan terkait dengan topik penelitian yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri atas empat bab dan setiap bab terdiri atas subbab-subbab yang akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir yang akan disusun. Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan yang masing-masing tertuang dalam subbab tersendiri. Bagian pendahuluan diakhiri dengan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terutama pembahasan tentang laporan operasional. Landasan teori tersebut berupa peraturan-peraturan tentang akuntansi pemerintahan dan sumber-sumber lain yang mendukung sebagai dasar dalam melakukan tinjauan atas laporan operasional pada objek karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas tiga subbab, yaitu metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Pada subbab metode pengumpulan data memuat metode yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan karya tulis ini. Pada subbab gambaran umum objek penulisan memuat informasi tentang objek penulisan yang relevan dengan masalah dan tujuan penulisan. Objek penulisan dalam karya tulis ini yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada subbab pembahasan hasil memuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berupa tinjauan atas laporan operasional dengan membandingkan dengan peraturan-peraturan terkait.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini mengemukakan simpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan ini menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis dengan menyajikan informasi yang ringkas agar mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, penulis juga memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemprov DIY.